

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arifianto. S. 2013. *Dinamika Perkembangan Pemamfaatan Ternologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya Di Masyarakat*. Media Bangsa. Jakarta.
- Asmaeny Azis Izlindawati. 2018. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Aziz dan R. Siti, 2018. *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Bambang Warsita, 2015, *Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Jakarta, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kemendikbud*.
- Emzir. 2010. *Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Eti Rochaety. Dkk. 2009. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Hesel Nogi Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pikiran George Edward*. Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Indrajit. 2005. *E-Government in Action*. Andi. Yogyakarta.
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media. Bandung.
- OC. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Alumni. Bandung.
- Philipus M Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Universitas Trisakti. Jakarta.
- 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pipin Syarifin dan Jubaedah Dedah. 2006. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chayaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sarinah dan Magdalena. 2017. *Pengantar Manajemen*. Deepublish. Yogyakarta.
- Siagian P.Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Syaiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press. Jakarta.
- Wasisto Raharjo Jati. 2012. *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia*. Jurnal Konstitusi.
- Winardi. 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

## **Artikel dan Jurnal**

- Chatarina Sitoresmi Triwiniastuti dan Bambang Suteng Sulasmono. 2020. "Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan", *Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 7 No 1*.
- Lugina Fitriani Khaerunnisa dan Arnia Fajarwati. 2019. "Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (Studi Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka)". *Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 7 Nomor 2*. Bandung.
- Miftahul Jannah, Endang Erawan, H. Burhanuddin. 2020. "Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Di SMP Negeri 21 Samarinda". *eJournal Akademik Publik Volume 8 No. 3*.
- Nur Ina Sholeha dkk. 2020. "Model Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung (Studi Tentang PPDB Tingkat SMA di Provinsi Lampung Tahun 2019)". *Jurnal Administrativa Volume 2 No. 2*.
- Sheila Rohmah, Wahyudi, Fanzal Pamungkas. 2020. "Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara". *Journal of Islamic Education Management Volume 1 No. 1*.
- Widodo Pramono. 2018. "Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Riau". *JOM FISIP Vol.5*.
- <https://makassar.tribunnews.com/2020/07/12/evaluasi-dan-solusi-ppdb-2020-sulsel-jenjang-sma-smk-ini-usulan-perbaikan-usb-untuk-rkb-apakah-itu>, diakses pada Rabu, 28 Oktober 2020 pada pukul 14:15 WITA

## **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah menengah Kejuruan.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).

Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Online Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.